

## **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Rasio Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik**

**Abdul Aziz<sup>1\*</sup>, Taufiq Azmi Harahap<sup>2</sup>, Asen Susanto<sup>3</sup>, Frans Gidion Sinuhaji<sup>4</sup>, Dewi Rafiah Pakpahan<sup>5</sup>**

*<sup>1,2</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mikroskil Medan*

*<sup>3,4,5</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahkota Tricom Unggul*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pendekatan rasio keuangan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas publik. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah masih bervariasi, dimana terdapat daerah yang telah menunjukkan tingkat kemandirian dan efektivitas yang baik, namun masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi dan optimalisasi belanja. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah perlu terus dilakukan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, penggunaan rasio keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Akuntabilitas Publik, Kemandirian Fiskal, Efektivitas Anggaran

**Copyright (c) 2026 Abdul Aziz**

---

✉Corresponding author :

Email Address : [abdulaziz130497@gmail.com](mailto:abdulaziz130497@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam mengelola keuangan publik sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan tersebut menuntut pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam perkembangan terkini, masyarakat semakin kritis dalam menilai penggunaan anggaran

daerah, sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam era desentralisasi fiskal karena mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan (Setiawan et al., 2026). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya tingkat kemandirian fiskal dan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam mendukung pembangunan (Anita & Octavianidori, 2024).

Selain itu, hasil penelitian empiris juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Beberapa daerah masih menunjukkan kinerja keuangan yang belum ideal, ditandai dengan rendahnya rasio kemandirian dan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer (Purba et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu diperkuat, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan tersebut, akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor yang sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik, disertai dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Astuti et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak dapat dipisahkan dari bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara komprehensif adalah melalui analisis rasio keuangan. Analisis ini memungkinkan penilaian terhadap berbagai aspek penting, seperti kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja daerah. Penggunaan rasio keuangan juga dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi keuangan daerah serta memudahkan perbandingan kinerja antar daerah maupun antar periode (Triyassari & Sambharakreshna, 2024).

Dengan demikian, analisis kinerja keuangan berbasis rasio keuangan menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik. Melalui evaluasi kinerja keuangan yang terukur dan berbasis data, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kemandirian keuangan sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sendiri muncul sebagai respons terhadap tuntutan akuntabilitas publik dan penerapan prinsip good governance yang menekankan transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah umumnya dilakukan melalui pendekatan rasio keuangan. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar angka absolut dalam laporan keuangan. Beberapa rasio yang lazim digunakan meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah. Penggunaan rasio keuangan terbukti mampu mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara optimal, serta menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Selain itu, analisis rasio juga mencakup rasio derajat desentralisasi, keserasian belanja, dan pengelolaan keuangan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa fiskal daerah.

Keterkaitan antara kinerja keuangan dan akuntabilitas publik sangat erat. Akuntabilitas publik menuntut pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan, khususnya yang tercermin melalui rasio kemandirian dan efektivitas, memiliki pengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kualitas pengungkapan laporan keuangan juga menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas, di mana pemerintah daerah dengan karakteristik tertentu cenderung memiliki tingkat transparansi yang berbeda. Secara teoritis, hubungan antara kinerja keuangan dan akuntabilitas publik dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan utama.

- a. Agency Theory menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara transparan dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat guna mengurangi asimetri informasi dan potensi moral hazard.
- b. Stewardship Theory memandang bahwa pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki orientasi untuk bertindak demi kepentingan masyarakat, sehingga mendorong terciptanya kinerja keuangan yang baik dan akuntabel.
- c. pendekatan Good Governance dan New Public Management (NPM) juga relevan dalam menjelaskan pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan NPM mendorong penerapan praktik manajerial yang lebih efisien dan berorientasi pada kinerja dalam sektor publik. Dengan demikian, analisis rasio keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari kualitas laporan keuangan, tingkat transparansi, serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi target pendapatan dan mengelola belanja secara efisien. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan berbasis rasio keuangan menjadi sangat penting dalam mendukung peningkatan kepercayaan publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkelanjutan.

### **Research Gap**

- a. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan rasio keuangan sebagai alat evaluasi yang bersifat teknis dan administratif, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dimensi akuntabilitas publik. Padahal, dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, kinerja keuangan tidak hanya diukur dari capaian angka-angka fiskal, tetapi juga dari sejauh mana

pengelolaan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan bermakna.

b. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan analisis parsial atau regresi linier sederhana, sehingga belum mampu menangkap hubungan simultan antar indikator kinerja keuangan secara komprehensif. Hal ini menyebabkan pemahaman mengenai pengaruh kolektif rasio keuangan terhadap akuntabilitas publik masih terbatas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dalam penelitian ini menjadi relevan karena mampu menganalisis hubungan laten secara simultan dan lebih mendalam.

c. Masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan indikator persepsi publik sebagai ukuran akuntabilitas dengan data keuangan pemerintah daerah. Sebagian besar studi hanya menggunakan data sekunder laporan keuangan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.

### **Novelty**

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam beberapa aspek.

a. Penelitian ini mengintegrasikan analisis rasio keuangan dengan konsep akuntabilitas publik sebagai variabel outcome, sehingga memberikan perspektif yang lebih holistik dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Penelitian ini menggunakan pendekatan SEM-PLS untuk menguji hubungan simultan antar variabel kinerja keuangan terhadap akuntabilitas publik, yang relatif masih jarang digunakan dalam konteks keuangan daerah di Indonesia.

c. Penelitian ini mengombinasikan data kuantitatif dari laporan keuangan dengan data persepsi responden, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat objektif secara angka, tetapi juga reflektif terhadap penilaian masyarakat.

### **METODE**

a. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antar variabel secara simultan serta cocok digunakan untuk model penelitian yang bersifat prediktif.

b. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia, dengan fokus pada data laporan keuangan daerah yang dipublikasikan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pemerintah daerah yang memiliki laporan keuangan lengkap dan telah diaudit.

c. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah serta data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memahami pengelolaan keuangan daerah, seperti aparatur pemerintah atau masyarakat yang relevan.

d. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan SmartPLS dengan tahapan sebagai berikut:

Uji outer model (validitas dan reliabilitas)

Uji inner model (R-square, path coefficient)

Uji hipotesis (bootstrapping)

e. Kriteria pengujian hipotesis didasarkan pada nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh hasil analisis yang komprehensif mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap akuntabilitas publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian model yang dilakukan melalui pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui rasio keuangan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

#### 1. Hasil Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Hasil evaluasi outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai outer loading masing-masing indikator berada di atas 0,70 yang mengindikasikan bahwa indikator mampu merepresentasikan konstruk laten secara baik. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) seluruh variabel telah melebihi 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki validitas konvergen yang memadai.

Nilai Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha juga menunjukkan angka di atas 0,70, yang berarti seluruh konstruk dalam penelitian ini reliabel. Dengan demikian, indikator rasio keuangan seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja terbukti konsisten dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

#### 2. Hasil Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Pengujian inner model menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (path coefficient) yang positif dengan nilai t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05.

Nilai R-Square pada variabel akuntabilitas publik menunjukkan kategori moderat hingga kuat, yang berarti variabel kinerja keuangan mampu menjelaskan variasi akuntabilitas publik secara substansial.

Secara lebih rinci, temuan penelitian menunjukkan bahwa:

Rasio kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tinggi, yang mengindikasikan kemampuan daerah dalam merealisasikan target pendapatan.

Rasio efisiensi masih menjadi permasalahan karena belanja daerah belum optimal.

Rasio keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Temuan ini konsisten dengan berbagai studi empiris terbaru.

#### 3. Sintesis Temuan Empiris

Penelitian ini menemukan bahwa secara umum kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada aspek kemandirian fiskal.

Studi oleh Triyassari dan Sambharakreshna (2024) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan PAD, tingkat

kemandirian keuangan masih sangat rendah sehingga pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat instruktif (Jurnal UMSU).

Hal serupa juga ditemukan oleh Saputra et al. (2024), yang menyatakan bahwa rasio kemandirian hanya mencapai sekitar 17,51%, menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap transfer pusat, sementara rasio efisiensi yang melebihi 100% mengindikasikan ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja daerah (Journal Universitas Jabal Ghafur).

Penelitian lain menguatkan bahwa rasio efektivitas PAD cenderung tinggi, bahkan melebihi 100%, yang berarti pemerintah daerah mampu melampaui target pendapatan, namun hal tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas belanja publik (Garuda).

Selain itu, studi komparatif menunjukkan bahwa daerah dengan opini WTP dan non-WTP memiliki perbedaan signifikan pada aspek kemandirian dan ketergantungan fiskal, tetapi tidak berbeda signifikan dalam hal efektivitas dan efisiensi (Portal e-Journal UNSRAT).

#### 4. Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan belanja dan tingkat kemandirian fiskal.

Kondisi di mana efektivitas tinggi tetapi kemandirian rendah menunjukkan adanya “paradoks kinerja keuangan daerah”, yaitu pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan, namun masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan.

Hal ini berdampak pada:

- Terbatasnya fleksibilitas kebijakan daerah
- Rendahnya inovasi fiskal
- Akuntabilitas yang bersifat administratif, bukan substantif

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rasio keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai indikator strategis dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

#### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap pemerintah.

Jika dikaitkan dengan Agency Theory, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Ketika kinerja keuangan menunjukkan kondisi yang baik—misalnya melalui peningkatan kemandirian fiskal dan efisiensi belanja—maka asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban agen terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dengan demikian, semakin baik kinerja keuangan, semakin kuat pula legitimasi pemerintah di mata publik.

Dari perspektif Stewardship Theory, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak semata-mata bertindak sebagai agen yang oportunistik, tetapi sebagai steward yang berorientasi pada kepentingan publik. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan adanya komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh literatur yang menegaskan bahwa aparatur pemerintah cenderung bertindak untuk mencapai tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, peningkatan rasio efektivitas dan efisiensi tidak hanya berdampak pada aspek teknis keuangan, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab pemerintah.

Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep Good Governance, khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rasio kemandirian memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih fleksibel dalam mengelola anggaran dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, temuan dari penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal di Indonesia masih relatif rendah dan didominasi oleh pola hubungan instruktif dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, rasio efektivitas dan efisiensi juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan serta mengelola belanja secara efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan anggaran yang efektif memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kinerja keuangan bukan hanya sekadar indikator administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membangun akuntabilitas publik. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja keuangan daerah harus menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Meskipun efektivitas pendapatan daerah tergolong relatif baik, kondisi tersebut belum diimbangi dengan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran dan kemandirian fiskal yang memadai. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perbaikan struktur belanja dan peningkatan kapasitas fiskal daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan akuntabilitas publik secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah disarankan meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan memperluas basis pajak, meningkatkan

kualitas sistem pemungutan, serta menerapkan digitalisasi dalam administrasi keuangan. Efisiensi anggaran juga perlu diperkuat melalui pengendalian belanja operasional dan peningkatan alokasi belanja produktif, khususnya belanja modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, akuntabilitas publik perlu didukung melalui transparansi pengelolaan keuangan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, dan peningkatan kualitas laporan keuangan agar lebih informatif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Referensi :

- Abidin, Z. (2021). *Manajemen keuangan daerah*. Deepublish.
- Anita, D., & Octavianidori, I. (2024). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS)*.
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2021). Accountability and transparency in public sector financial reporting. *International Journal of Public Sector Management*, 34(5), 489–507.
- Cohen, S., & Karatzimas, S. (2022). Public sector accounting reforms and accountability: Evidence from European governments. *Accounting Forum*, 46(2), 123–145.
- Grossi, G., & Steccolini, I. (2020). Pursuing public accountability through financial reporting: A global perspective. *Public Money & Management*, 40(5), 325–334.
- Halim, A. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2021). *Akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas publik*. UPP STIM YKPN.
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4).
- Manes Rossi, F., Brusca, I., & Aversano, N. (2023). Financial sustainability and accountability in local governments. *Sustainability*, 15(3), 1–15.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*.
- Purba, S., Panggabean, M. A., Br Purba, T., Manalu, E., & Sitanggang, C. A. (2024). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Barelang*.
- Rodhiyah, R., & Kusuma, P. F. (2025). Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah: Tinjauan literatur sistematis. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 3(4), 184–193.
- Saputri, S., Adinda, L., Fhadilah, S. N., Alvarini, N., & Hasnita, N. (2024). Analisis bibliometrik laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 6(3).
- Sari, R. P., Oktaviana, R. D., Athaillah, U. I., & Djasuli, M. (2025). Effectiveness and accountability of local budget financing: Evidence from Surabaya City. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Setiawan, A. B., et al. (2026). Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022–2024. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*.



Triyassari, A., & Sambharakreshna, Y. (2024). Value for money dan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*.